

PEREMPUAN DAN ANAK

PERDA KABUPATEN WONOGIRI NO. 8, LD 2025/NO. 8, TLD NO. 214, 53 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

- ABSTRAK
- : - Segala bentuk kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - bahwa anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia;
 - bahwa kasus kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak serta penelantaran anak di Kabupaten Wonogiri merupakan masalah yang serius dan kompleks yang membutuhkan perlindungan dari pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha sehingga perempuan dan anak sebagai korban memperoleh hak-haknya dan tercipta lingkungan masyarakat dan dunia usaha yang aman dan tentram;
 - bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan perubahannya, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perlindungan perempuan dan anak;
 - bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum pembentukan produk hukum daerah dan berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak;
 - Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Provinsi Jawa Tengah.
 - Peraturan daerah ini berisi tentang kewenangan dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan, hak perempuan dan anak, penyelenggaraan perlindungan perempuan, penyelenggaraan perlindungan anak, pengelolaan data dan informasi, peran serta, penghargaan, pembinaan dan pengawasan serta pembiayaan.
- CATATAN
- : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 14 Oktober 2025.
 - Penjelasan: 10 hlm.